

## BAB II

### SEJARAH *JUGUN IANFU*

#### PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI ASIA

##### 2.1. Pengertian *Jugun Ianfu*

*Jugun ianfu* terdiri dari lima buah kanji yang masing-masing memiliki arti 従 “pembantu” atau “pengikut”, 軍 “tentara”, 慰 “penghibur”, 安 “tenang” atau “senang”, dan 婦 “perempuan”.<sup>24</sup> Dengan demikian, *jugun ianfu* secara literatur dapat diartikan sebagai perempuan penghibur yang mengikuti tentara (Jepang), untuk memberikan kesenangan.

*Jugun ianfu* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan penghibur atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *comfort women*. Perempuan-perempuan ini terlibat dalam perbudakan seks selama Perang Dunia II di koloni Jepang. Kecenderungan *jugun ianfu* adalah mereka merupakan wanita yang berasal dari wilayah jajahan yang berhasil dikuasai oleh Jepang.

Dalam Kamus Wikipedia, dijelaskan bahwa *jugun ianfu* merupakan perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada masa Perang Dunia II.<sup>25</sup> Menurut riset oleh Dr. Hirofumi Hayashi, *jugun ianfu* terdiri dari perempuan Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya (Malaysia dan

---

<sup>24</sup> Andrew N. Nelson, *Kamus Kanji Modern Jepang-Indonesia*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

<sup>25</sup> *Loc.cit*, *Jugun Ianfu*.

Singapura), Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, India, Eurasia, Belanda, dan penduduk kepulauan Pasifik.<sup>26</sup>

Selain *jugun ianfu*, tampaknya Jepang sebelumnya telah mengenal istilah *geisha* dan *karayuki-san* yang juga merupakan perempuan penghibur. Berbeda dengan *jugun ianfu*, secara literatur, *geisha* berarti seniman. Dapat diartikan juga sebagai perempuan penghibur yang dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi penghibur profesional. Pelayanan mereka kepada tamu-tamunya tidak terbatas pada pelayanan seksual, namun juga pelayanan kesenian, seperti menari dan menyanyi.<sup>27</sup> *Geisha* sangat umum pada abad ke-18 dan abad ke-19, dan masih ada sampai sekarang ini, walaupun jumlahnya tidak banyak lagi.<sup>28</sup> Tamu yang dilayani oleh seorang *geisha* adalah para petinggi dan orang-orang yang dapat dikatakan mampu karena biaya sewa mereka sangatlah mahal.

Menurut data literatur, *karayuki-san* berarti orang yang bepergian ke Cina.<sup>29</sup> Pada pertengahan abad ke 19, politik isolasi di Jepang runtuh karena Jepang ingin membuka negaranya untuk perdagangan. Setelah politik baru itu berjalan, maka Jepang menjadi terbuka untuk kaum pendatang. Saat itu pulalah para perempuan Jepang memiliki kesempatan untuk pergi ke negara-negara tetangga. Mereka menyelundupkan diri dan pergi ke negara luar (biasanya Cina dan Rusia) untuk bekerja, termasuk menjadi pekerja seks komersial.

Sedangkan, menurut Kodansha Encyclopedia, *karayuki-san* adalah:

Wanita Jepang yang pergi untuk bekerja sebagai pelacur di beberapa tempat, seperti Siberia, Manchuria, Cina, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, India, dan bahkan Amerika dan Afrika, setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868. Walaupun *karayuki-san* datang dari seluruh bagian Jepang, namun mayoritasnya adalah penduduk asli dari Kyushu bagian barat, khususnya wilayah Amakusa, yang merupakan tempat aslinya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ahli Sejarah Beberkan Dokumen Buktikan Praktek Jugun Ianfu, 6 Februari 2008, <<http://www.antara.co.id>>.

<sup>27</sup> *Geisha*, Kodansha Encyclopedia of Japan III, Tokyo: Kodansha Ltd., 1983, hlm. 15.

<sup>28</sup> *Geisha Kyoto Gion*, 22 April 2008, <[http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Geisha\\_Kyoto\\_Gion.jpg](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Geisha_Kyoto_Gion.jpg)>.

<sup>29</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 167.

<sup>30</sup> *Karayuki-san*, Kodansha Encyclopedia of Japan IV, Tokyo: Kodansha Ltd., 1983, hlm. 159.

Walaupun ada beberapa *jugun ianfu* yang dahulunya berprofesi sebagai *karayuki-san*, namun terdapat perbedaan mendasar antara perempuan *jugun ianfu* yang mantan *karayuki-san* dengan perempuan *jugun ianfu* yang berasal dari wilayah jajahan. Mantan *karayuki-san* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan dari wilayah jajahan. Biasanya mereka menjadi mucikari yang membantu mengurus pengelolaan tempat hiburan. Sedangkan perempuan dari wilayah jajahan adalah perempuan yang menempati kedudukan yang rendah, dan mereka diharuskan melayani para tentara baik dari kalangan menengah ke bawah sampai kepada tentara dari golongan menengah ke atas. Selain itu, mereka tidak memiliki hak untuk memilih pria mana yang ingin mereka layani.

## **2.2. Sejarah Jugun Ianfu**

### **2.2.1. Awal Terbentuknya Jugun Ianfu**

Seperti telah disebut sebelumnya, di Jepang dunia pelacuran sudah dikenal sejak lama. Setelah terbukanya politik isolasi, semakin besar pula kesempatan perempuan Jepang yang bekerja ke luar negeri untuk bekerja pada bidang yang berhubungan dengan hal tersebut. Segera setelah Restorasi Meiji, berdirinya Jepang moderen pada tahun 1868, jumlah *karayuki-san* bertambah secara drastis. Di antara mereka terdapat perempuan-perempuan yang melacurkan diri, yang semakin tersebar luas bukan hanya sebatas Cina dan Rusia saja, namun juga sampai ke negara-negara di Asia Tenggara, India, Australia, Hawaii, bahkan Afrika Selatan.

Pada saat wakil pemerintah Jepang dalam bidang perdagangan, Sewazaki Kazuto, pertama kali mengunjungi Vladivostok pada 1875, ia menemukan sebuah tempat pelacuran Jepang yang melayani klien Rusia.<sup>31</sup> Pada tahun dua belas tahun selanjutnya, yaitu 1887, jumlah orang Jepang yang tinggal di Vladivostok bertambah antara 4000—5000 orang, dan lebih dari 200 orangnya adalah *karayuki-san*. Banyak di antara perempuan-perempuan ini berasal dari Shimabara di Kyushu. Dari keadaan seperti ini, maka pihak militer Jepang pada waktu itu

<sup>31</sup> *Op.cit.* Hlm. 167-168.

melihat adanya kesempatan untuk melibatkan *karayuki-san* ke dalam sistem pelacuran yang akan mereka buat.

Setelah tercatat 223 kasus perkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang, Letnan Jendral Okamura Yasuji mengajukan solusi kepada gubernur Prefektur Nagasaki pada waktu itu untuk mengirim perempuan-perempuan penghibur ke Shanghai.<sup>32</sup> Setelah itu kasus pelecehan yang terjadi di Cina turun secara drastis, kemudian dengan pemikiran yang rasional ia memperluas prostitusi militer ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nyoman Buleleng, mantan tentara Jepang yang menetap di Indonesia,

“Tampaknya orang Jepang menyadari bahwa, walaupun dalam keadaan perang, para tentara memiliki kebutuhan biologis yang tidak dapat dielakkan... Secara otomatis, rumah untuk menanggapi tujuan itu didirikan di setiap wilayah yang diduduki oleh Jepang.”<sup>33</sup>

Dalam *Jugun Ianfu Shiryō-shū*, Kementerian Peperangan Jepang memiliki dokumen yang berjudul “Hal-hal yang berkaitan dengan perekrutan perempuan dan para pekerja pada tempat hiburan” yang dikeluarkan pada 4 Maret 1938, kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Area Cina Pusat. Dokumen itu berisi:

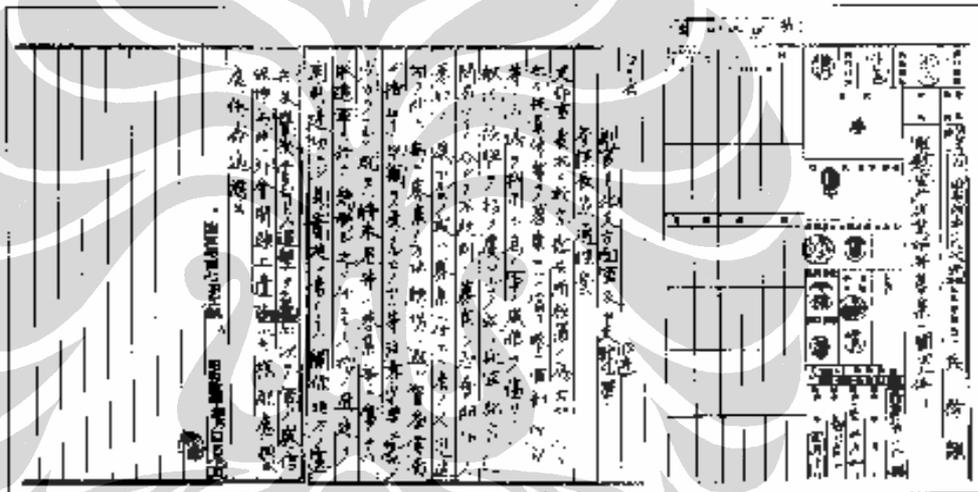
Dalam perekrutan perempuan dan para pekerja dari Jepang dalam pendirian tempat hiburan di tempat di mana terjadinya Insiden Cina, beberapa pihak secara sengaja menyatakan bahwa mereka memiliki izin dari penguasa militer, sehingga merusak reputasi dari tentara dan menyebabkan kesalahpahaman dari masyarakat umum. Beberapa lainnya menyebabkan masalah sosial dengan merekrut (perempuan) secara ilegal melalui media-media pada masa perang, mengunjungi penghibur, dan semacamnya. Berkaitan dengan pemilihan agen yang tidak sesuai, beberapa diantaranya telah ditahan dan diinvestigasi oleh polisi dikarenakan metode dalam perekrutan dan penculikan. Jadi, dibutuhkan perhatian yang tinggi dalam memilih agen yang sesuai. Ke depannya, dalam merekrut (perempuan) itu, setiap tentara harus memperhatikan (prosedur pemilihan) dengan berhati-hati dalam memilih agen yang sesuai. Dalam perekrutan yang sebenarnya, setiap tentara harus bekerja dengan baik dengan *Kempeitai* lokal atau polisi yang berkuasa, dengan demikian

<sup>32</sup> George L. Hicks, *Comfort Women: Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second World War*, London: Paperback, 1997, hlm. 45.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 144.

dapat menjaga martabat tentara serta menghindari masalah sosial. Yang di atas dikeluarkan sebagai mandat.<sup>34</sup>

Surat ini dibuat oleh staf dari Biro Administrasi Militer dibawah nama Kolonel Fushibuchi Senichi. Umezu Yoshijirō, yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Kementerian Peperangan, menjadi orang yang mengakui surat tersebut. Hal yang paling penting di sini adalah surat tersebut merupakan ‘surat mandat’. Dengan kata lain, surat tersebut juga diakui oleh Menteri Peperangan pada waktu itu, yaitu Sugiyama Hajime.



**Gambar 2.1.** Dokumen Tentara Jepang.

Mengenai Perekrutan Perempuan Untuk Tempat Hiburan, “Matters Regarding the Recruitment of Women Workers for Military Comfort Stations”, dalam *Rikushi mitsudainiki*, No. 10.<sup>35</sup>

Dokumen lain yang berisikan tentang fakta bahwa Kementerian Peperangan Jepang mempertimbangkan *jugun ianfu* sebagai suatu rencana yang efektif untuk memelihara kedisiplinan militer dan mencegah penyakit kelamin. Dokumen ini disebut “Tindakan untuk mempertinggi kedisiplinan militer berdasarkan pengalaman-pengalaman pada Insiden Cina”. Pada 19 September 1940, dokumen

<sup>34</sup> *Op. Cit.* Tanaka. Hlm. 23.

<sup>35</sup> Yoshimi Yoshiaki, *Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II*, Suzanne O’Brien (Trans.), New York: Columbia University Press, 2000, hlm. 42.

tersebut dijadikan “bahan edukasi” untuk semua unit tentara. Adapun isinya sebagai berikut:

(Sejak dimulainya Perang Sino-Jepang), walaupun hasil yang sangat baik telah diraih dalam perang, namun para serdadu kita telah melakukan berbagai kejahatan seperti perampasan, pemerkosaan, pembakaran, pembunuhan tawanan, dan semacamnya yang berlawanan dengan intisari dari prinsip yang dimiliki oleh Tentara Kerajaan. Itu menjadi penyesalan yang juga telah menjadi sesuatu yang tidak disukai baik di dalam maupun di luar Jepang, dan menjadi kesulitan untuk mencapai tujuan dari perang suci kami... Setelah meneliti keadaan di mana terjadi kejahatan dan perbuatan tidak senonoh, kami menyadari bahwa itu semua terjadi segera setelah pertempuran... Dalam zona perang, merupakan suatu kebutuhan untuk berupaya agar menciptakan suatu lingkungan yang baik, sedapat mungkin memperhatikan fasilitas untuk kesenangan, dan untuk menghapus juga mengontrol perasaan berat dan sedih dari para tentara... Khususnya, efek psikologi yang diterima oleh para serdadu dari tempat hiburan adalah sesuatu yang paling mendalam, maka dari itu dipercaya bahwa peningkatan moral dari para serdadu, pemeliharaan disiplin, pencegahan kejahatan dan penyakit kelamin, bergantung pada suksesnya pengawasan dari ini (tempat hiburan).<sup>36</sup>

Sebelum istilah *jugun ianfu* dikenal, istilah yang digunakan adalah *joshi gun*. Istilah *joshi gun* ini dapat diartikan sebagai tentara perempuan. Semenjak wilayah jajahan Jepang meluas ke berbagai penjuru, tentara-tentara perempuan ini turut dikirim ke wilayah-wilayah pendudukan Jepang.

Berdasarkan undang-undang zaman kontemporer setelah Perang Dunia II, perempuan yang berhubungan dengan pelacuran dibagi menjadi tiga, yaitu *geigi*, *shōgi*, dan *shakufu*. Yang paling dekat hubungannya dengan pelacuran di kalangan militer adalah *shōgi*, yang dilakukan di bawah *kōshōseido*. Menurut Takemura Tamio dalam bukunya yang berjudul *Haishō Gundō*, *kōshōseido* tidak dapat disamakan dengan pelacuran, karena adanya perasaan sukarela untuk mengabdikan kepada negara.<sup>37</sup> Di dalam sistem ini juga terkandung elemen feodal yang cukup kuat. Hal ini dapat terlihat dalam ungkapan berikut ini:

<sup>36</sup> *Op.cit.* Hlm. 24.

<sup>37</sup> Masanao Kurahashi, *Jugun Ianfu Mondai no Rekishiteki Kenkyuu*, Tokyo, 1994.

こうけんりよく ;公権力によって ;公認された ;売春

Kōkenryokuniyotte kōninsaretabaishun

Artinya: “pelacur yang diberikan izin demi kepentingan umum”

ほうけんてきようそ ;封建的要素が ;多分に ;残した ;売春のしくみ

Hōkentekiyōsoga tabunni nokoshitabaishunno shikumi

Artinya: “pelacur yang kemungkinan menjadi unsur penting yang tersisa dalam feodalisme”

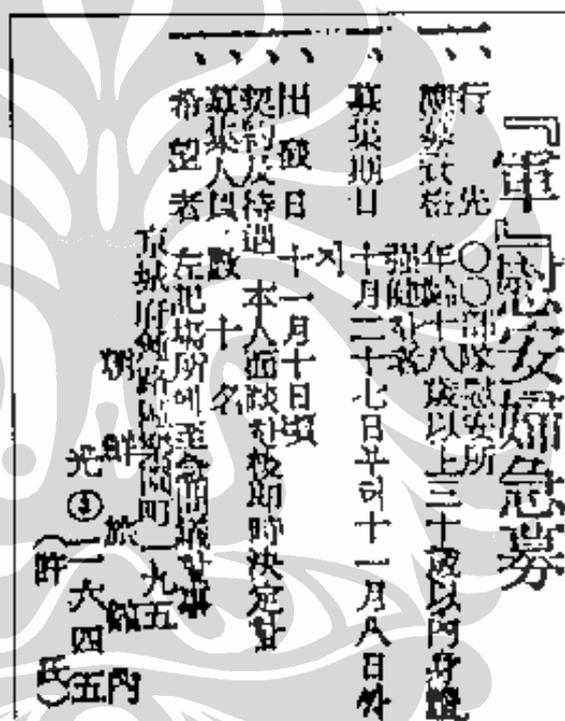
Pada awal pembentukan sistem ini, pemerintah Jepang berharap dengan adanya hiburan yang layak bagi para tentara akan meningkatkan moral dan kinerja dari para tentaranya. Selain itu, dengan pengadaan hiburan yang terkontrol, diharapkan penyebaran penyakit kelamin akan lebih mudah untuk diatur dan menyingkirkan kebutuhan untuk memberikan ijin istirahat bagi tentara. Untuk menunjang rencana tersebut, maka dibangunlah tempat-tempat hiburan bagi tentara di garis depan. Di tempat itulah para *jugun ianfu* ditempatkan untuk melayani tentara Jepang. Tempat hiburan tersebut tersebar hampir di seluruh koloni Jepang dan tempat hiburan yang pertama berlokasi di dekat kota Shanghai, Cina, pada tahun 1932.<sup>38</sup>

Seiring dengan meluasnya koloni Jepang, maka jumlah tempat-tempat hiburan bagi para tentara pun semakin bertambah. Jumlah tempat hiburan tersebut didokumentasikan pada laporan dari Kepala Seksi Urusan Medis dari Biro Medis dalam Kementrian Peperangan, Kimbara Setsuzō, saat rapat kepala seksi kementrian pada 3 September 1942. Laporan tersebut merincikan rumah-rumah hiburan yang didirikan di luar Jepang, yaitu 100 rumah di Cina Utara, 140 rumah di Cina Pusat, 40 rumah di Cina Selatan, 100 rumah di Asia Tenggara, 10 rumah di Barat-daya Pasifik, 10 rumah di Sakhalin Selatan (totalnya adalah 400 rumah).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 45.

<sup>39</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 24.

Para *jugun ianfu* awalnya direkrut melalui cara yang cukup konvensional, yaitu dengan memuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai pelacur. Iklan-iklan tersebut muncul pada surat kabar yang terbit di Jepang dan koloni-koloni Jepang, seperti di Korea, Manchukuo, dan dataran Tiongkok. Tanggapan atas iklan tersebut awalnya cukup baik. Banyak perempuan yang dengan sukarela mendaftarkan diri mereka sendiri dan ada juga perempuan-perempuan yang dijual oleh keluarganya sendiri karena alasan ekonomi.

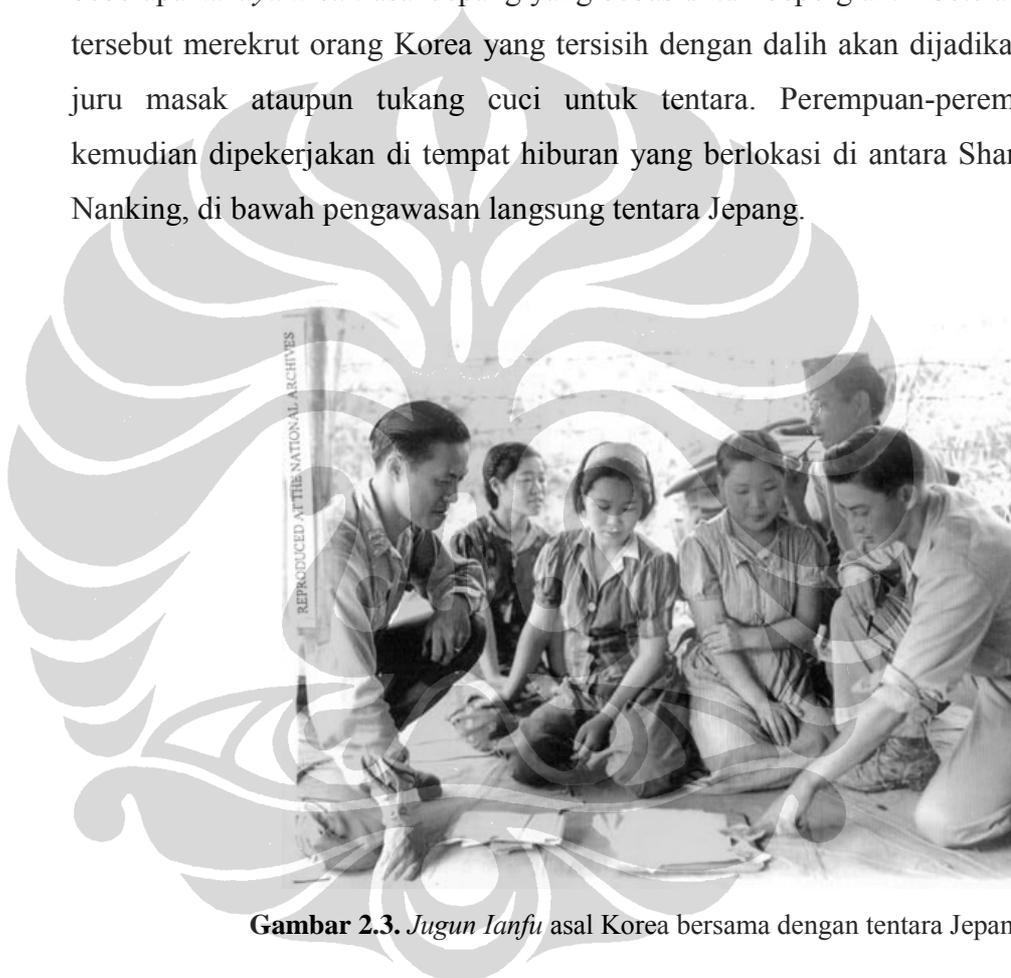


Gambar 2.2. Perekrutan *jugun ianfu* yang tampak pada surat kabar Korea.<sup>40</sup>

Pada iklan perekrutan *jugun ianfu* yang diterbitkan di surat kabar Korea, 27 November 1944, di atas dikatakan bahwa tentara Jepang sangat membutuhkan perempuan penghibur berusia 18—30 tahun. Di dalamnya juga di cantumkan tempat tujuan pendaftaran, gaji bulanan, waktu bekerja, dan tujuan penempatan kerja.

<sup>40</sup> *Comfort Women*, 12 Mei 2008, <<http://www.answers.com/topic/comfort-women>>.

Jawatan Khusus Cabang Shanghai, badan yang membantu pembangunan tempat hiburan, terlibat dalam pembentukan tempat hiburan ini secara tersembunyi. Mereka memiliki agen yang bertindak sebagai pesuruh, yang kemudian merekrut sebanyak mungkin perempuan untuk dijadikan *jugun ianfu*. Pada tahun 1932, agen tersebut menjelajah ke pelosok pulau Kyushu dan merekrut beberapa *karayuki-san* asal Jepang yang bebas untuk bepergian.<sup>41</sup> Setelah itu agen tersebut merekrut orang Korea yang tersisih dengan dalih akan dijadikan sebagai juru masak ataupun tukang cuci untuk tentara. Perempuan-perempuan ini kemudian dipekerjakan di tempat hiburan yang berlokasi di antara Shanghai dan Nanking, di bawah pengawasan langsung tentara Jepang.



**Gambar 2.3.** *Jugun Ianfu* asal Korea bersama dengan tentara Jepang.<sup>42</sup>

Apabila ditinjau dari sudut organisasi, menurut Tanaka Yuki dalam bukunya *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and The US Occupation*, maka rantai kekuasaan dalam pembentukan sistem *jugun ianfu* pada waktu itu adalah sebagai berikut:

<sup>41</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 46.

<sup>42</sup> *Jugun Ianfu Korea*, 6 Juni 2008, <<http://www.jugunianfuindonesia.org/>>.

**Tabel 2.1.** Rantai Kekuasaan pada Sistem *Jugun Ianfu*.<sup>43</sup>



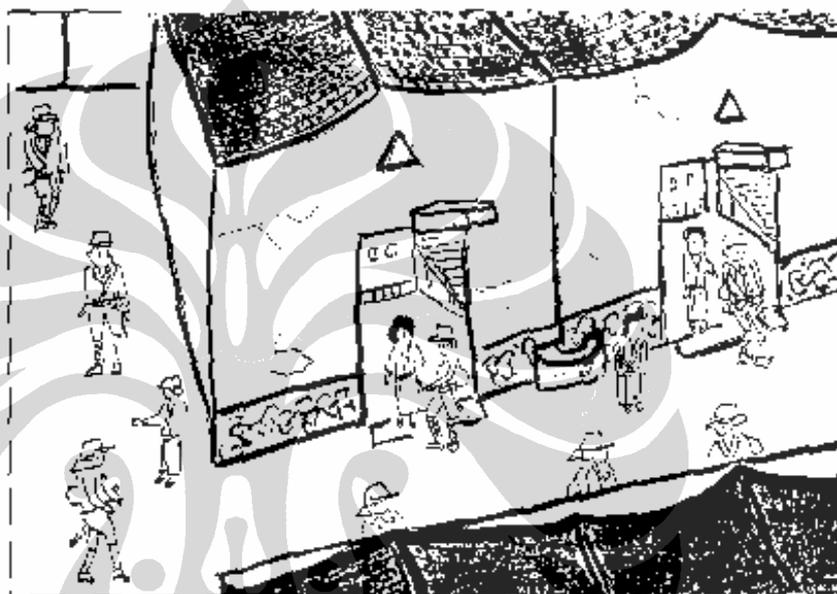
Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sistem *jugun ianfu* yang ada berpusat pada pemerintah kekaisaran Jepang, lalu turun pada Kementerian Perang dan Kepala Umum Staf Tentara Jepang. Selanjutnya, kekuasaan tersebut diturunkan kepada staf tentara di wilayah pendudukan Jepang, seperti Korea, Taiwan, dan sebagainya, termasuk Indonesia. Staf tentara di wilayah pendudukan biasanya memiliki agen khusus untuk merekrut para perempuan untuk dijadikan *jugun ianfu*.

Menurut Tanaka Yuki, pada Kementerian Peperangan Jepang tidak ada seksi khusus yang merancang sistem dari *jugun ianfu*. Tetapi ada biro yang bersangkutan yang memberikan instruksi kepada para tentara yang kemudian juga memberikan instruksi yang berkaitan dengan sistem tersebut. Contohnya, Biro Administrasi Militer memberikan instruksi yang menyangkut dengan kedisiplinan militer dan juga moral pada pasukan Jepang, yang untuk selanjutnya juga memberikan instruksi pada kedisiplinan dan moral pada *jugun ianfu*. Begitu pula dengan Biro Medis yang bertanggung jawab memberikan saran mengenai kesehatan pada *jugun ianfu* secara umum dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penyakit kelamin.

Dr. Aso, petugas medis yang pertama kali memeriksa perempuan-perempuan *jugun ianfu*, mengemukakan beberapa foto dari tempat hiburan Shanghai beserta peraturan yang diperuntukkan bagi pengguna tempat hiburan

<sup>43</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 22.

tersebut.<sup>44</sup> Digambarkan bahwa tempat hiburan tersebut berisi sepuluh blok barak seperti gubuk-gubuk, menjadi satu dengan gubuk pengawas, dan tiap gubuknya ditutupi dengan tirai. Setiap gubuk dibagi menjadi sepuluh kamar-kamar kecil, dan setiap kamar diberi nomor, serta memiliki pintu pemisah. Umumnya tempat-tempat hiburan lainnya juga didesain seperti ini.



**Gambar 2.4.** Sketsa Tempat Hiburan oleh Murakami Sennosuke.<sup>45</sup>

Tempat hiburan semacam ini kemudian menyebar dengan luas dan memiliki peraturannya masing-masing. Peraturan-peraturan yang ditegakkan bergantung dari pemerintah yang berkuasa di tiap wilayah. Umumnya peraturan-peraturan itu berisi mengenai jam operasi tempat hiburan, panjangnya waktu tiap kunjungan, dan skala pembayaran. Bahkan mereka juga menyantumkan harga apabila pengunjungnya ingin melakukan seks tanpa kondom.

Setelah daerah-daerah pendudukan Jepang tersebut menjadi lebih maju, contohnya seperti Shanghai, pengoperasian tempat hiburan yang sebelumnya ditangani secara langsung oleh tentara menjadi berubah ditangani oleh operator

<sup>44</sup> *Op.cit.* Hlm. 45.

<sup>45</sup> *Op.cit.* Yoshiaki. Hlm. 132.

privat.<sup>46</sup> Hal ini dikarenakan dengan pendirian operator privat maka akan lebih mudah untuk ditangani atau diakses, di samping itu juga agar dapat menyediakan servis yang lebih atraktif bagi para tentara. Alasan lainnya adalah antisipasi Jepang akan adanya pengamatan dari dunia internasional mengenai ‘tentara yang menjalankan servis prostitusi’.

Walaupun Korea yang menjadi daerah sumber perekrutan para *jugun ianfu*, tetapi di daerah ini tidak banyak tampak didirikan tempat hiburan. Sejak dipindahkannya tentara Jepang ke zona perang aktif, jumlah tentara Jepang di daerah semenanjung Korea menjadi semakin kecil. Fungsi utama daerah Korea pada waktu itu berubah hanya menjadi tempat transit tentara Jepang.

Seiring dengan menyebarnya daerah kekuasaan Jepang, maka penyebaran perempuan-perempuan *jugun ianfu* pun semakin meluas. Pada tahun 1942, Menteri Urusan Luar Negeri Jepang, Tōgō Shigenori, menginstruksikan stafnya untuk menyertakan para *jugun ianfu* dengan dokumen perjalanan militer dan tidak lagi memerlukan paspor untuk perjalanan ke luar negeri.<sup>47</sup>

Timbul suatu pertanyaan mengenai mengapa para perempuan *jugun ianfu* hampir selalu berasal dari Taiwan, Cina, maupun berbagai wilayah Asia Tenggara, dan sebagian besarnya adalah Korea? Jawabannya adalah karena Jepang mengenal kesadaran akan status yang terkait dengan etnis atau dikatakan sebagai rasisme. Jepang merasa bahwa bangsanya patut disejajarkan dengan bangsa-bangsa Barat dan merasa bahwa bangsa Asia lain berada di bawahnya. Dengan adanya perasaan rasis kepada negara-negara di Asia, maka Jepang merasa perempuan-perempuan di wilayah tersebut pantas untuk menjalankan peran sebagai *jugun ianfu*. Pada skala pemilihan orang Jepang terhadap *jugun ianfu*, tempat pertama diduduki oleh perempuan Jepang dan Okinawa, setelah itu ditempati oleh perempuan Korea, Cina, dan yang terakhir adalah perempuan Asia Tenggara yang memiliki kulit lebih gelap.<sup>48</sup> Begitu pula dengan biaya yang dikenakan pada tempat hiburan—bergantung pada rangking, sering kali dipengaruhi oleh etnis *jugun ianfu* tersebut.

---

<sup>46</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 47.

<sup>47</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 27.

<sup>48</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 48.

Perempuan Korea yang awalnya digunakan oleh Jepang sebagai *jugun ianfu* merupakan perempuan berkebangsaan Korea atau biasa disebut dengan *chōseijin*, dan bukanlah perempuan warga negara Korea atau biasa disebut dengan *kankokujin*.<sup>49</sup> Dengan kata lain, perempuan-perempuan Korea tersebut tidak tinggal pada wilayah Korea, melainkan pada daerah boneka Jepang. Namun seiring dengan tingginya permintaan akan *jugun ianfu*, maka munculah alternatif-alternatif perempuan dari wilayah yang berlainan seperti Cina, Filipina, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoshida Seiji, penulis buku *My War Crimes: The Forced Draft of Koreans* yang menceritakan pengalamannya pada saat Perang Dunia II di daerah Shanghai, pada setiap resimen terdapat paling tidak satu buah tempat hiburan.<sup>50</sup> Dalam tempat hiburan tersebut umumnya berisi beberapa perempuan paruh-baya Jepang dan dua puluh sampai tiga puluh orang perempuan Korea. Bagi pegawai Jepang senior, disediakan klab khusus yang mewah dengan hiburan yang bertipe *geisha*. Dalam bukunya juga diceritakan pada saat ia memimpin ekspedisi ‘perekrutan budak’ atau mungkin lebih tepat dikatakan perampasan orang-orang untuk dijadikan budak. Pada waktu itu ia merekrut ribuan buruh laki-laki dan sekitar 1000 perempuan untuk menjadi penghibur.

Yamatani Tetsuo, seorang pembuat film mengenai *jugun ianfu*, menganalisa dan menggeneralisasikan mengenai *jugun ianfu* Cina menjadi tiga kategori, yaitu perempuan yang miskin dikarenakan perang dan tidak lagi merasa berarti, lalu perempuan yang dipaksa untuk masuk ke tempat hiburan, serta perempuan yang secara sukarela menjadi *jugun ianfu* untuk menjadi mata-mata bagi tentara Cina.<sup>51</sup>

Gangguan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari pekerjaan semacam ini. Para tentara dianjurkan untuk menggunakan alat pengaman atau kondom, namun tidak sedikit dari mereka yang menggunakan kondom yang telah kotor, bahkan banyak juga yang tidak mau menggunakan

<sup>49</sup> *Op.cit.* Kurahashi. Hlm. 50-83.

<sup>50</sup> Seiji Yoshida, *My War Crimes: The Forced Draft of Koreans*, Tokyo: San-ichi Shobo, 1983.

<sup>51</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 67.

benda tersebut. Kondom-kondom yang disediakan di tempat hiburan menjadi tanggung jawab dari Departemen Keuangan Tentara serta Markas Besar Logistik. Mereka bertanggung jawab mengirimkan kondom ke wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang dan juga memastikan kondisi kondom yang siap pakai. Pada tahun 1942, contohnya, terhitung 32,1 juta kondom yang telah dikirim ke berbagai unit di luar Jepang.<sup>52</sup>

Walaupun demikian, tampaknya masih banyak daerah yang tidak mendapatkan kondom. Terkadang, pada saat pria-pria tersebut memiliki kemauan untuk menggunakan kondom, justru benda tersebut tidak disediakan pada tempat hiburan. Yang menjijikkan adalah adanya kabar bahwa ada beberapa tempat hiburan yang melakukan pencucian dan pemakaian kembali kondom yang sebelumnya telah digunakan.

Pada ruangan tempat *jugun ianfu* melayani, umumnya disediakan semacam pembersih khusus untuk membersihkan kemaluan untuk para lelaki yang telah melakukan hubungan seks. Begitu juga para *jugun ianfu* yang juga diharapkan untuk membersihkan kemaluan mereka setelah melakukan hubungan seks, walaupun pada akhirnya mereka hanya sempat membasuh kemaluan mereka dengan kapas.

Selain itu juga terdapat pemeriksaan medis yang dilakukan secara periodik terhadap para *jugun ianfu*. Terkadang dilakukan oleh petugas medis yang memiliki latar belakang ginekolog, namun lebih sering dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman di bidang ini. Mereka hanya memeriksa apabila ada perubahan warna ataupun nanah pada kemaluan *jugun ianfu*. Menurut keterangan dari Madam X, salah seorang *jugun ianfu*, ada salah seorang perempuan yang terkena penyakit kelamin, setelah itu perempuan tersebut diambil dan dipukuli sampai meninggal.<sup>53</sup>

Di tempat hiburan militer Jepang, hak-hak reproduksi perempuan sangat diabaikan. Walaupun terkena penyakit kelamin merupakan sesuatu yang buruk bagi para perempuan ini, namun ada lagi yang lebih buruk yaitu kehamilan. Untuk

---

<sup>52</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 24.

<sup>53</sup> *Op.cit.* Hlm. 96.

mencegah adanya kasus kehamilan, umumnya perempuan-perempuan itu diberikan semacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan untuk mencegah kehamilan. Apabila sudah terjadi kehamilan maka mereka dipaksa untuk mengaborsi janin mereka dengan menggunakan pil. Ada juga tempat hiburan yang memperbolehkan untuk melahirkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, namun setelah itu *jugun ianfu* tersebut harus kembali melayani para tentara. Selain dengan obat-obatan, ada juga tempat hiburan yang mensterilisasi *jugun ianfu* agar tidak lagi dapat menstruasi.

Sejalan dengan meluasnya kekuasaan tentara Jepang, maka bertambah pula kebutuhan akan tempat hiburan bagi tentara Jepang, dengan kata lain prostitusi yang berbasis sukarela menjadi tidak mencukupi. Pada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan lapangan pekerjaan, maka pekerjaan dengan bayaran yang baik menjadi suatu hal yang menarik agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Namun pada saat taktik tersebut tidak dapat berjalan lancar guna merekrut *jugun ianfu*, maka perekrutan langsung pun menjadi suatu hal yang biasa. Perekrutan langsung ini adalah perekrutan yang dilakukan secara langsung oleh polisi ataupun pemerintah lokal, yang biasanya menggunakan kekerasan terhadap para perempuan yang mereka rekrut. Mereka mendatangi rumah-rumah penduduk, kemudian menculik anak gadisnya untuk dijadikan *jugun ianfu*. Pada akhirnya, perempuan dikondisikan untuk menjadi budak seks di bawah Undang-Undang Umum Mobilisasi Nasional yang begitu mengikat.<sup>54</sup> Berikutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan sistem *jugun ianfu*.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

### 2.2.2. Degradasi *Jugun Ianfu*

Terdapat pernyataan Menteri Kehakiman Nagano yang ditulis pada buku *Jugun Ianfu Mondai no Rekishiteki Kenkyuu*, mengenai pelacuran yang dilakukan oleh Jepang, Inggris dan Amerika yang kemudian menuai kontroversi. Adapun pernyataan Nagano tersebut berbunyi:

「<sup>いあんふ</sup> ;慰安婦は<sup>せいど</sup> ;制度の<sup>さ</sup> ;差はあるが、<sup>べい</sup> ;米、<sup>えいぐん</sup> ;英軍など  
も<sup>おな</sup> ;同じようなことをやっている。<sup>いあんふ</sup> ;慰安婦は<sup>とうじ</sup> ;当時の  
<sup>こうしょう</sup> ;公娼であって、それを<sup>いま</sup> ;今の<sup>め</sup> ;目から<sup>じょせい</sup> ;女性べつ<sup>し</sup> ;視と  
か、<sup>かんこくじんさべつ</sup> ;韓国人差別とか<sup>い</sup> ;言えない。」

Terjemahannya:

Ada perbedaan derajat menyangkut *jugun ianfu*, walaupun toh Amerika dan Inggris melakukan hal yang sama. *Jugun ianfu* merupakan pelacuran legal, dan apabila dilihat dari kaca mata sekarang, maka tidak bisa dikatakan sebagai pelecehan perempuan ataupun diskriminasi terhadap orang Korea.<sup>55</sup>

Kesalahan fatal pernyataan Nagano terletak ketika ia menyamakan *jugun ianfu* dengan pelacuran yang juga terjadi di kalangan Amerika dan Inggris, sudah jelas bahwa latar belakang pihak Jepang berbeda berbeda dengan kedua pihak sebelumnya. Dalam sistem pelacuran yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris, Departemen Peperangannya tidak mengadopsi kebijakan yang memperbolehkan pendirian tempat hiburan di bawah pengawasan mereka. Sedangkan pelacuran yang dilakukan oleh Jepang adalah suatu sistem yang di bawah oleh Departemen Peperangan Jepang.

Selain itu, dalam pelacuran *jugun ianfu* yang dilakukan oleh Jepang banyak terdapat tipu daya yang dilakukan terhadap perempuan *jugun ianfu*. Salah satunya adalah tawaran untuk disekolahkan oleh pemerintah Jepang. Bahkan banyak pula yang diculik dari keluarganya untuk dijadikan perempuan penghibur. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran yang

<sup>55</sup> *Op.cit.* Kurahashi. Hlm. 18.

dilakukan oleh Jepang adalah suatu bentuk pemaksaan terhadap kaum perempuan demi kepentingan tentara Jepang.

Sistem yang diterapkan oleh tentara Jepang yang pada awalnya merupakan suatu sistem yang legal. Seperti yang ditunjukkan oleh Yamatani Tetsuo, seorang pembuat film mengenai perempuan penghibur di Okinawa, pada artikel yang muncul di koran Asahi Tokyo, Jepang merekam bukti-bukti mengenai adanya tempat-tempat hiburan.<sup>56</sup> Hal ini adalah suatu yang biasa di kalangan orang Jepang karena tempat hiburan semacam itu dianggap suatu kesenangan yang normal. *Kempeitai* atau polisi Jepang menyimpan foto-foto dari perempuan-perempuan *jugun ianfu*. Namun, sistem ini berubah menjadi sebuah eksploitasi perempuan setelah wilayah pendudukan Jepang semakin luas dan jumlah perempuan penghibur yang sebelumnya ada tidaklah mencukupi. Banyak perempuan yang diambil secara paksa untuk dijadikan penghibur, bahkan mobilisasi perempuan-perempuan tersebut disembunyikan, dan dicatat pada daftar transportasi sebagai unit dari ‘amunisi’, ‘persediaan kantin’. Barang kali hanya sedikit yang tidak disembunyikan identitasnya sebagai manusia.

Berdasarkan dokumen dari Tentara Kwantung yang mengatakan bahwa para perempuan *jugun ianfu* diperlakukan sebagai ‘persediaan militer’, dapat diestimasikan bahwa jumlah perempuan yang dieksploitasi oleh Jepang berkisar antara 80.000—100.000 orang perempuan.<sup>57</sup> Pada rencana militer Jepang yang dibuat pada Juli 1941, terdapat 20.000 perempuan *jugun ianfu* yang dibutuhkan untuk 800.000 tentara Jepang, atau dengan kata lain satu orang perempuan untuk 40 orang tentara. Namun, terdapat estimasi yang berbeda dari beberapa peneliti. Berikut ini tabel mengenai perkiraan jumlah *jugun ianfu* semasa Perang Pasifik.

---

<sup>56</sup> *Op.cit.* Hlm. 83.

<sup>57</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 30.

Tabel 2.2. Perkiraan Jumlah *Jugun Ianfu*.<sup>58</sup>

Nama Peneliti	Tahun Publikasi	Jumlah Personel Militer	Parameter Penggantian	Jumlah <i>Jugun Ianfu</i>
Ikuhiko Hata	1993	3 juta	1 untuk 50 tentara	90.000
Yoshiaki Yoshimi	1995	3 juta	1 untuk 100 tentara	45.000
		3 juta	1 untuk 30 tentara	200.000
Su Zhiliang	1999	3 juta	1 untuk 30 tentara	360.000
			4	410.000
Ikuhiko Hata	1999	2.5 juta	1 untuk 150 tentara	20.000

Yoshiaki Yoshimi *Jugun Ianfu (The Wartime Comfort Women)*, Iwanami Shoten, 1995, English translation, *Comfort Women: Sexual Slavery in Japanese Military during the World War II*, Columbia University Press, 2000

Ikuhiko Hata *Showa-shi no Nazo wo Ou (Inside Japan's Showa Years, 1920s to 1980s), Volume 2*, Bungeishunju, 1993

----- *Ianfu to Senjo no Sei (The Comfort Women and Sex in War)*, Shincho-Sha, 1999

Su Zhiliang *Ianfu Kenkyu (Research on Comfort Women)* (in Chinese), Shanghai Bookstore Publishers, 1999

Taksiran yang berbeda-beda dari tabel 2.2 bergantung dari anggapan dasar dan metodologi yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Kolom ketiga adalah jumlah personel militer yang ditempatkan di perantauan selama Perang Pasifik (1941—1945), setelah itu kolom keempat adalah perbandingan jumlah personel militer yang ada dengan tiap *jugun ianfu*. Setelah itu kolom kelima merupakan perkiraan rasio pergantian perempuan *jugun ianfu*, karena adanya perempuan *jugun ianfu* baru yang mengisi tempat dari perempuan *jugun ianfu* yang dikirim pulang.

Dari jumlah yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat ketimpangan dari jumlah personel militer dengan jumlah perempuan *jugun ianfu*. Walaupun sudah banyak perempuan yang memang berprofesi sebagai PSK/pelacur, namun jumlah

<sup>58</sup> *Number of Comfort Station and Comfort Women*, 11 Juni 2008, <<http://www.awf.or.jp/e1/index.html>>.

itu tetap tidak dapat mengimbangi jumlah personel militer yang ada. Hal ini membuat tentara Jepang di wilayah pendudukan merekrut semakin banyak perempuan untuk dijadikan *jugun ianfu* dengan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah dengan cara kekerasan.

Seorang peneliti Jepang, Kurahashi Masanao, penulis buku *Jugun Ianfu Mondai no Rekishiteki Kenkyuu*, mengklasifikasikan *jugun ianfu* ke dalam dua tipe, sebagai mana ditulis pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3.** Dua Tipe *Jugun Ianfu*.<sup>59</sup>

ばいしゅんぷ ;売春婦 (PSK/pelacur)	せいできどれい ;性的奴隷 (budak seks)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mendapat upah</li> <li>■ Menemani tentara, seperti <i>geisha</i></li> <li>■ Terdiri dari perempuan Jepang dan Korea, namun jumlah perempuan Korea jauh lebih banyak</li> <li>■ Sistem yang dibentuk untuk mencegah perkosaan di medan perang</li> <li>■ Dilakukan dengan kesadaran sang perempuan untuk mencari nafkah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tidak diupah</li> <li>■ Melayani kebutuhan seksual prajurit</li> <li>■ Terdiri dari perempuan dari setiap daerah yang diduduki Jepang, seperti Cina, Korea, pulau-pulau Pasifik, Asia Tenggara</li> <li>■ Terjadi akibat luasnya wilayah ekspansi Jepang, sehingga <i>baishunfu</i> tidak dapat mencukupi, kurangnya dana</li> <li>■ Direkrut secara paksa, dibujuk akan disekolahkan atau dipekerjakan</li> </ul>

Sebenarnya bentuk seperti *baishunfu* telah terbentuk sejak perang antara Jepang dengan Rusia, pada saat misi di Siberia tahun 1918—1922. Setelah itu, sistem *jugun ianfu* di bawah kepemimpinan militer Jepang pertama kali di bentuk Shanghai pada tahun 1932. Kemudian berkembang dengan masuknya perempuan-perempuan Korea pada saat insiden di Manchuria tahun 1933.

<sup>59</sup> *Op.cit.* Kurahashi. Hlm. 50-83.

Seiring dengan ekspansi Jepang selama 15 tahun (1931—1945), sistem ini berubah menjadi sebuah eksploitasi terhadap perempuan. Selain itu dengan adanya penolakan pengeluaran visa perjalanan bagi pelacur Jepang oleh Menteri Luar Negeri Jepang pada waktu itu, maka sistem yang sebelumnya telah diterapkan mengalami hambatan yang cukup besar. Hal itu membuat tentara Jepang mencari perempuan dari wilayah-wilayah di mana mereka ditempatkan dengan berbagai macam cara.

Pada wilayah perkotaan, iklan konvensional melalui orang ketiga disalahgunakan bersama dengan penculikan. Namun, di garis depan, terutama di negara di mana orang ketiga jarang tersedia, militer secara langsung memerintahkan pemimpin lokal untuk menyediakan perempuan untuk rumah bordil. Situasi ini menjadi buruk ketika perang berlanjut. Di bawah tekanan perang, militer menjadi tidak bisa menyediakan persediaan perempuan yang cukup untuk tentara Jepang, lalu sebagai tanggapan dari hal tersebut, tentara Jepang meminta atau merampok perempuan dari daerah setempat.

Di wilayah Korea dikenal adanya *The Women's Voluntary Service Corps*, yaitu sebuah badan yang beranggotakan perempuan-perempuan yang secara sukarela mengabdikan diri mereka dalam perang. Seharusnya mereka dipekerjakan di pabrik untuk membuat barang-barang militer, namun pada kenyataannya sering kali disalahgunakan menjadi suatu tindakan prostitusi.<sup>60</sup>

Mereka yang tergabung dalam lembaga-lembaga sukarela semacam ini sering kali diberikan janji-janji apabila Jepang menang dalam perang, maka mereka akan mendapatkan juga kemenangan seperti apa yang diterima oleh pihak Jepang. Orang-orang Korea yang minim pengetahuan mengenai Jepang maka akan dengan mudah menerima janji-janji seperti ini. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri, termasuk menyerahkan anak-anak perempuan mereka kepada pihak tentara Jepang.

Anak-anak perempuan dari kelas tuan tanah dan pejabat lokal umumnya menjalankan peraturan ini, karena pihak Jepang memiliki wewenang untuk mengatur mereka dengan dalih untuk mengatur populasi pedesaan. Seorang guru

---

<sup>60</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 52.

sekolah dasar mengabarkan bahwa ia diinstruksikan untuk memilih sejumlah dari anak didiknya yang telah senior untuk dimasukkan dalam daftar pekerja, dengan spesifikasi yaitu harus berasal dari keluarga yang miskin yang lebih mungkin lebih mudah setuju dikarenakan alasan finansial.<sup>61</sup>

### 2.3. *Jugun Ianfu* Setelah Perang Dunia II

Penjajahan Jepang terhadap perempuan-perempuan malang ini berakhir pada saat dijatuhkannya bom di Horoshima dan Nagasaki, Jepang. Setelah itu pihak Jepang menarik seluruh pasukannya ke Jepang untuk memperbaiki keadaan Jepang yang porak-poranda. Bersamaan dengan itu, maka para *jugun ianfu* dilepaskan oleh tentara Jepang. Sebagian dari mereka ada yang dikembalikan ke tempat asal mereka, namun sebagian sisanya tinggal di tempat yang sama, yaitu tempat di mana mereka ditinggalkan oleh tentara Jepang.

Kim Hak Sun adalah *jugun ianfu* pertama asal Korea yang bersedia menceritakan kisah hidupnya kepada dunia luas sebagai bagian dari aksinya untuk menuntut pemerintah Jepang dengan legal. Berkat keberaniannya, banyak para *jugun ianfu* yang mengikuti jejaknya. Perempuan-perempuan itu kemudian menuntut haknya pada Tokyo District Court, 6 Desember 1991.<sup>62</sup>

Di persidangan itu, Kim Hak Sun menuntut adanya kompensasi bagi para *jugun ianfu* dan juga adanya pengakuan dari pemerintah Jepang atas perekrutan mereka sebagai perempuan penghibur. Namun yang disayangkan adalah sulitnya ditemukan dokumen yang secara resmi berkaitan dengan adanya tempat hiburan para tentara Jepang ini. Setelah Perang Dunia II, dokumen-dokumen semacam ini dihancurkan oleh pihak Jepang, sehubungan dengan dokumen-dokumen resmi tersebut dikhawatirkan nantinya akan dijadikan sebagai bukti kejahatan Jepang pada masa Perang Dunia II.

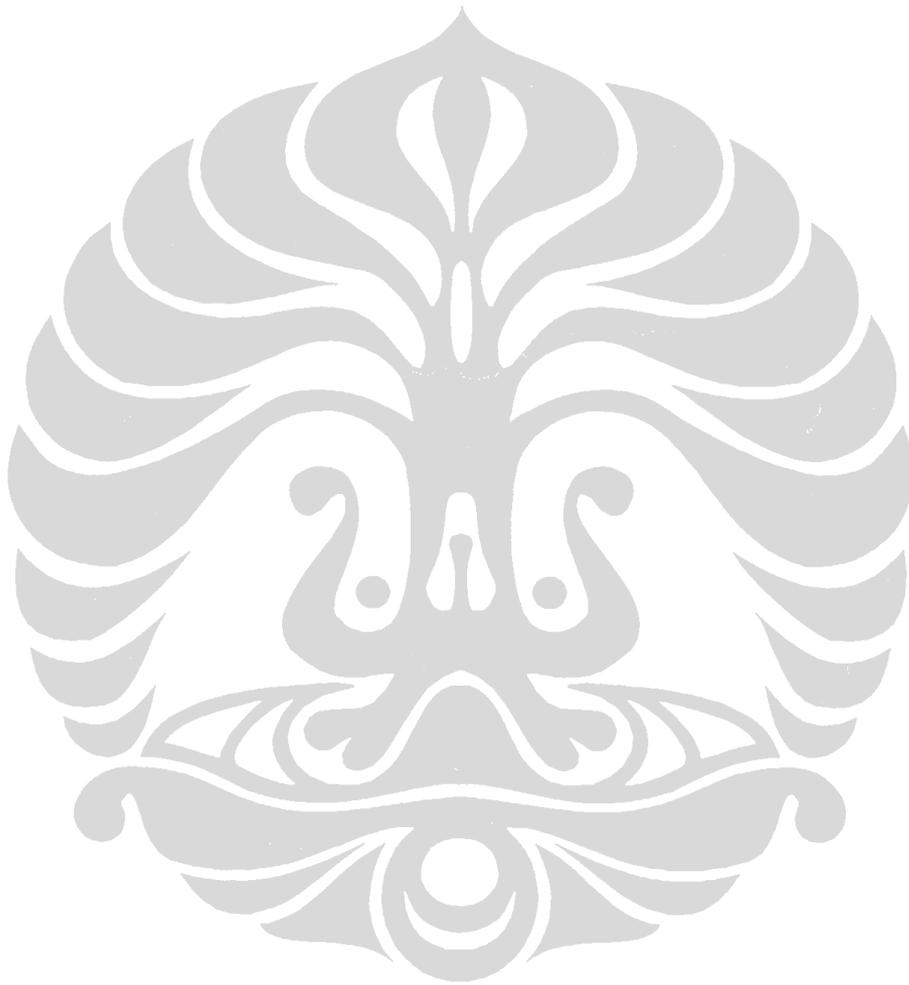
Pada tahun 1996 pemerintah Jepang membentuk Asian Women Fund sebagai penebus kesalahan mereka pada masa lalu. Lembaga swadaya masyarakat

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm. 172.

<sup>62</sup> *Ibid.* Hicks. Hlm. 11.

ini dibentuk untuk mengumpulkan dana masyarakat guna membayar kompensasi para perempuan korban perbudakan seksual balatentara Jepang.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> *Kompas*. 13 Desember 2000. Hlm. 25.



### **BAB III**

## **JUGUN IANFU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA**

Sebelum Perang Cina-Jepang tahun 1894—1895 dan Jepang-Rusia tahun 1904—1905, orang Jepang memiliki status sebagai “orang timur asing”. Namun, setelah kemenangan Jepang atas Cina dan Rusia, Jepang kemudian disejajarkan dengan orang Eropa. Setelah itu, Jepang juga berhasil melakukan ekspansi besar-besaran dan bahkan berhasil memenangkan beberapa peperangan. Salah satunya ketika Jepang membom Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941 waktu Hawaii. Masyarakat Jepang yang ada di luar Jepang semakin terangkat. Keadaan mereka mulai diperhitungkan dan bahkan mereka semakin dihormati oleh penduduk sekitar.<sup>64</sup>

Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1941—1945. Setelah Jerman, Jepang menduduki tempat kedua dalam kekuatan militer. Pada Desember 1941 Jepang menyerang Honolulu, Hawaii, dari udara. Pada saat itu juga Amerika dan Inggris segera menyatakan perang terhadap Jepang. Kemudian Gubernur Hindia-Belanda pun turut menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian pecahlah perang Pasifik. Pada awal Desember 1941, Indonesia adalah prioritas

---

<sup>64</sup> Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi (ed.), *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 2.

yang tinggi untuk diduduki dikarenakan tambang-tambang minyak yang dimiliki oleh Indonesia.

Dengan menggunakan taktiknya, pada tahun 1942 Jepang melancarkan perang kilat ke Asia Tenggara. Pada akhirnya 10 Januari 1942, Kalimantan mulai diinvasi oleh Jepang.<sup>65</sup> Cara-cara Jepang masuk ke Indonesia pada waktu itu adalah dengan tidak menampakkan keinginan untuk menjajah Indonesia, melainkan dengan usaha mengangkat Indonesia yang selama ini telah disengsarakan Belanda. Pihak militer Jepang di Indonesia secara terang-terangan menjatuhkan wibawa bangsa Belanda untuk menyenangkan hati bangsa Indonesia. Maka dari itu, kedatangan Jepang pada waktu itu disambut dengan sangat hangat oleh masyarakat Indonesia.<sup>66</sup> Pada akhirnya, tanggal 9 Maret 1942, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jendral Hein ter Poorten, secara resmi menyerah dan menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada pihak militer Jepang di Kalijati.

Pemerintah Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia membagi wilayah kekuasaan pemerintahan menjadi dua bagian, yaitu wilayah kekuasaan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Wilayah kekuasaan Angkatan Darat meliputi wilayah Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Tentara Divisi XVI, dengan pusatnya di Jakarta; wilayah Sumatra dipimpin oleh Tentara Divisi XXV, dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sedangkan wilayah lainnya, yaitu wilayah Indonesia bagian Timur dikuasai oleh Angkatan Laut di bawah Armada Barat Daya, dengan markasnya di Ujung Pandang. Wilayah Timur merupakan wilayah yang memiliki sumber daya minyak yang melimpah, sehingga Angkatan Laut Jepang pada waktu itu dapat mengeksploitasi minyak untuk keperluan bahan bakarnya.

Jepang di masa pendudukannya di Indonesia lama kelamaan bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, melainkan juga sumber daya manusianya. Pihak militer Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga kerja manusia untuk keperluan perang mereka. Semua rakyat dikerahkan, mulai dari

---

<sup>65</sup> *Loc.cit. Indonesia: Era Jepang.*

<sup>66</sup> A.B. Lopian, et. al, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988, hlm. 14.

pemaksaan untuk menjadi tentara sukarela sampai dengan pekerja paksa, bahkan perempuan pun tidak luput dari pengerahan tersebut.

Perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dipaksa untuk turut aktif berperan serta dalam peperangan yang dilakukan Jepang. Salah satunya adalah didirikannya perkumpulan wanita *Fujinkai*. Kaum perempuan Indonesia ini dipaksa secara halus untuk menyerahkan perhiasan mereka bahkan peralatan dapur mereka untuk keperluan perang yang sedang dilakukan oleh bangsa Jepang.<sup>67</sup>

Selain itu, perempuan di masa itu juga dikerahkan dalam pekerjaan-pekerjaan massal yang bersifat kerja bakti, seperti penyediaan dapur umum dan juga keterlibatan di dalam palang merah. Perempuan-perempuan ini juga bekerja untuk merawat tentara Jepang yang terluka ketika berperang dengan Sekutu. Pekerjaan yang paling menonjol dalam masa pendudukan Jepang adalah pengerahan tenaga kerja perempuan di bidang seksualitas, yaitu menjadi *jugun ianfu*. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan Indonesia karena posisi mereka yang lemah, namun membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka dan keluarga.

Salah satu yang harus dihindari oleh kaum perempuan maupun seluruh penduduk yaitu memperlihatkan sikap anti Jepang. Jepang tidak dapat mentolerir sikap yang mendekati anti Jepang. Jepang tidak memandang bulu dalam memberikan hukuman terhadap yang anti pada mereka. Orang-orang yang anti tersebut, nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar hitam yang harus diawasi oleh tentara Jepang. Polisi rahasia Jepang yang bertugas untuk mengawasi orang-orang dalam daftar hitam disebut *Kempeitai*. *Kempeitai* sangat disegani oleh rakyat maupun tentara Jepang sendiri. Tentara Jepang pun akan langsung memberi hormat kepada *Kempeitai* bila mereka bertemu walaupun saat itu mereka dalam keadaan mabuk.<sup>68</sup>

Para algojo *Kempeitai* selalu siap melakukan penyiksaan saat mereka melakukan interogasi kepada para terdakwa. Kaum perempuan yang lemah juga

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm. 53.

<sup>68</sup> G. Pakpahan, *1261 Hari di Bawah Sinar Matahari Terbit*, Jakarta: CV. Marintan Djaya, 1979, hlm. 147.

diperlakukan seperti bukan manusia. Mereka disiksa lahir dan batin sampai para algojo *Kempeitai* itu puas walaupun tuduhan akhirnya tidak terbukti. Perempuan interniran yang paling mudah mendapat tuduhan karena posisinya dulu sewaktu bekerja atau karena kedudukannya pada masa Belanda.<sup>69</sup>

Perlakuan tentara Jepang terhadap kaum perempuan Indonesia sering disebut sebagai salah satu pendorong terjadinya pemberontakan. Contohnya, saat pemberontakan Tentara Blitar, terjadi bukan hanya karena persoalan dendam pribadi tentara PETA, tetapi juga karena ketidaktahanan mereka akan sikap tentara Jepang terhadap kaum perempuan. Banyak yang berpendapat bahwa perlakuan Jepang terhadap perempuan Indonesia sudah melampaui batas. Orang-orang Jepang bersama orang-orang Tiong Hoa telah menghina kaum perempuan. Orang Tiong Hoa banyak yang menjadi penyalur perempuan untuk keperluan tentara Jepang, supaya mereka mendapat kedudukan dan kekuasaan.<sup>70</sup>

Awal dari pembentukan tempat hiburan militer Jepang adalah Maret 1942, ketika Markas Besar Tentara Jepang di Pasifik Selatan memutuskan untuk mendirikan tempat hiburan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik.<sup>71</sup> Markas Besar Tentara Jepang Pasifik Selatan, yang berada di Rabaul, Papua Nugini<sup>72</sup>, meminta kepada Markas Besar Tentara Taiwan untuk mendapatkan *jugun ianfu* dan mengirim mereka ke Borneo (Kalimantan). Fakta dari permintaan itu adalah pengiriman 70 orang perempuan *jugun ianfu* dari Taiwan ke Borneo yang telah memiliki dokumen perjalanan militer dari Kementerian Perang. Dokumen-dokumen ini memiliki segel dari Kepala Biro Administrasi dari Kementerian Perang, Tanaka Ryūkichi, dan bawahannya, Kawara Naoichi.<sup>73</sup>

Pada tahun 1943 terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak Barat dan membuat balatentara Jepang bergeser dari agresif menjadi defensif. Sikap Jepang terhadap nasionalisme Indonesia juga berubah, sehingga kaum nasionalis di Jawa dan Sumatra mendapatkan keleluasaan berpropaganda. Namun

<sup>69</sup> L. De Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda*, Jakarta: Kesaint Blanc, 1991, hlm. 108.

<sup>70</sup> *Op.cit.* Hlm. 138.

<sup>71</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 27.

<sup>72</sup> *Rabaul*, 20 Januari 2008, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Rabaul>>.

<sup>73</sup> *Op.cit.*

pada saat itu juga hubungan laut dan udara Jepang dengan balatentaranya yang menyebar di wilayah Asia Tenggara menjadi sulit. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi sulitnya Jepang untuk mendatangkan *jugun ianfu* dari Jepang, Cina, dan Korea, maka sebagai gantinya para gadis Indonesia dikirimkan ke garis depan sebagai penghibur atau *jugun ianfu*.

Dalam dokumen yang dibuat oleh Laksamana Muda Nagaoka Takasumi, Kepala Biro Urusan Militer dari Kementerian Angkatan Laut, pada 30 Mei 1942, menuliskan bahwa angkatan laut mengutus *tokuyoin* (staf khusus) untuk mengurus berbagai macam hal yang berkaitan dengan laut (dalam urusan pengiriman *jugun ianfu*) pada wilayah Asia Tenggara. Contohnya, 45 perempuan dikirim ke Celebes (Sulawesi), 40 perempuan ke Balikpapan, 50 perempuan ke Penan, dan 30 perempuan ke Surabaya. Dokumen-dokumen ini kemudian dikirim ke Laksamana Muda Nakamura Toshihisa, Kepala Staf Armada Bagian Barat-daya.<sup>74</sup>

Masa di antara Maret 1942—Agustus 1945 merupakan masa di saat Indonesia sangatlah miskin. Masyarakat Indonesia sangat sulit mencari sandang maupun pangan, karena semuanya dikuasai oleh pihak Jepang. Petani di desa-desa tidak berhak atas hasil panen mereka, sehingga banyak kelaparan di sana-sini, bahkan kematian. Orang-orang dipaksa untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan Jepang (*Romusha*). Apabila ada yang pingsan, karena tidak kuat bekerja dalam keadaan perut kosong dan sebagainya, maka ia akan disadarkan dengan tamparan bertubi-tubi.



<sup>74</sup> Minoru Shigemura. "Tokuyōin to iu Na no Butai" dalam *Tokushū Bungei Shunjū* No. 1, Tokyo: Bungei Shunjū-sha, 1955, hlm. 224-225.

**Gambar 3.1.** Orang-orang yang dijadikan *Romusha*.<sup>75</sup>

Dalam keadaan sulit seperti itu, terdapat janji Jepang untuk memberi kesempatan belajar pada pemuda dan pemudi Indonesia ke Tokyo dan Singapura (pada waktu itu disebut Shonanto). Sebagaimana yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer dalam *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, janji itu mulai terdengar pada tahun 1943. Jepang berjanji akan menyekolahkan generasi muda Indonesia agar dapat mempersiapkan kemerdekaan dan mengabdikan dirinya di kemudian hari.<sup>76</sup>

Masyarakat Indonesia pada waktu itu banyak yang terbuai dengan alibi Jepang tersebut. Menurut keterangan Soeryono Hadi, bekas anggota pimpinan LBKN *Antara* Perwakilan Surabaya,

“...dalam tahun 1943 kakak saya mengatakan bahwa Pemerintah Pendudukan Dai Nippon menyerukan kepada setiap orangtua yang mempunyai anak gadis agar segera mendaftarkan kepada pemerintah akan anak gadisnya tersebut. Ada pun maksud pendaftaran, menurut keterangan Dai Nippon pada waktu itu, mereka akan disekolahkan! Sehubungan dengan ini, di Ungaran (di mana saya bertempat tinggal sejak dari tahun 1943 s/d 1945) telah didaftar anak-anak gadis dari umur 15-17 tahun sejumlah lima orang. Seorang di antaranya adalah anak teman dekat kakak saya, yang bertempat tinggal dan sekolah dengan saya pula. Mereka didaftar dan dibawa ke Semarang guna pengurusan selanjutnya.”<sup>77</sup>

Sebagian besar dari laporan yang ada menyebutkan bahwa orangtua menyerahkan anak gadisnya dikarenakan janji Jepang yang akan menyekolahkan putri mereka. Janji-janji ini tidak disiarkan melalui harian atau barang cetakan lain, namun melalui mulut ke mulut. Karena itu, sesampainya di desa-desa menjadi berlainan. Adapun yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah *Sendenbu* atau jawatan propaganda, yang merupakan bagian dari alat perang Jepang. *Sendenbu*, di bawah pengawasan *Kempeitai*, memiliki kekuasaan untuk

<sup>75</sup> *Galeru Romusha dan Jugun Ianfu*, 28 Februari 2008, <<http://www.swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php>>.

<sup>76</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007, hlm. 5.

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

memerintah *pangreh praja* yang memiliki kekuasaan tertinggi pada desa-desa. Setelah itu *pangreh praja* meneruskan ke bawahan-bawahannya yang lain.

Karena besarnya kekuatan yang dimiliki kekuatan tentara Jepang pada waktu itu, maka para orangtua yang menyerahkan anak gadisnya kepada pihak Jepang sebagian besar tidak berdasar atas kerelaan, melainkan atas ketakutan mereka akan pihak Jepang. Tentara Jepang pada waktu itu tidak akan segan untuk menghukum dengan keji penduduk yang mereka anggap bersalah di muka umum.

Pada umumnya, cara Jepang merekrut para *jugun ianfu* Indonesia sama dengan yang dilakukan di Jepang dan Korea. Tentara Jepang awalnya menyebarkan janji-janji dengan menawarkan beasiswa ataupun pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu *jugun ianfu* Belanda bernama Ketjee Ruizeveld, tentara Jepang merekrut para gadis dengan buaian-buaian akan uang yang nantinya dapat membuat mereka mencukupi kehidupannya.<sup>78</sup> Perempuan-perempuan itu dijanjikan akan dipekerjakan di rumah sakit ataupun restoran, dan apabila cara-cara itu tidak berhasil, maka mereka akan melakukan paksaan-paksaan. Lalu setelah itu balatentara Jepang mendata para perempuan yang akan menjadi sasaran, dan menjemput mereka untuk dibawa pada tempat-tempat tertentu. Sebagian perempuan dibawa melalui jalan laut dan sebagian jalur darat. Ada yang langsung dibawa ke tempat tujuan, namun ada juga yang melalui beberapa tempat persinggahan. Para perempuan tersebut disebar ke wilayah-wilayah di Indonesia, maupun di luar Indonesia.

Perempuan-perempuan korban itu dikumpulkan di rumah khusus dengan penjagaan militer yang sangat ketat. Diperkirakan ada lebih dari empat puluh rumah hiburan militer yang didirikan oleh Jepang di Indonesia.<sup>79</sup> Setiap hari, para *jugun ianfu* harus menunggu tamu dan harus memberikan layanan seks yang tidak mereka kehendaki.

Para tamu yang datang, umumnya dari pihak militer Jepang, harus membeli karcis untuk mendapatkan layanan seks, namun *jugun ianfu* sendiri tidak

---

<sup>78</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 151.

<sup>79</sup> *Loc.cit.* *Number of Comfort Station and Comfort Women.*

pernah dibayar.<sup>80</sup> Para perempuan *jugun ianfu* wajib melaksanakan pemeriksaan rutin oleh dokter. Apabila ada yang sakit, umumnya menderita penyakit kelamin, maka ia akan diberikan obat-obatan. Dan apabila ada yang hamil, ia akan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Dalam melayani tamu, *jugun ianfu* juga sering mendapat perlakuan kasar serta tidak manusiawi.

### 3.1. *Jugun Ianfu* di Wilayah Jawa

Satu-satunya kasus *jugun ianfu* yang melibatkan perempuan Belanda adalah di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah.<sup>81</sup> Jepang pada waktu itu membuat beberapa tim untuk merekrut para perempuan. Kapten dari perekrutan ini kemudian pergi ke empat kamp di Semarang dan dua kamp di dekat Ambarawa. Mereka membuat daftar persyaratan perempuan yang akan direkrut. Umumnya adalah perempuan lajang dan sehat yang berusia antara 17—35 tahun.

Ada kasus di wilayah Cepu, di mana para perempuan Belanda diperkosa di wilayah ini. Bahkan di suatu ruang darurat rumah sakit, di tempat para perempuan dan anak-anak di tempatkan di satu tempat yang sama, para perempuannya diperkosa.<sup>82</sup> Walaupun perempuan-perempuan Belanda itu melapor pada seorang komandan Jepang dan tampak pada awalnya timbul tanggapan yang baik, namun pada akhirnya berujung sia-sia. Para perempuan yang melapor itu dimasukkan ke suatu ruangan kelas, dengan alibi mereka akan aman apabila berada di dalam kelas tersebut. Sangat disayangkan, karena pada malam harinya para tentara Jepang beserta komandan tersebut malah menyergap mereka di dalam kelas tersebut. Walaupun sang komandan tidak ikut andil, namun para tentara itu memperkosa mereka beramai-ramai.

Walaupun ada ketidakjelasan karena akhir dari cerita di atas tidak dibacakan di hadapan pengadilan, namun perihal mengenai cerita tersebut diiyakan oleh Letnan Kolonel Damste<sup>83</sup>, seorang berkebangsaan Belanda yang

<sup>80</sup> Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Momoye Mereka Memanggilku*, Jakarta: Esensi, hlm. 108.

<sup>81</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 57.

<sup>82</sup> *Ibid.* Hlm. 269.

<sup>83</sup> *Legacies of the Comfort Women*, 1 Juni 2008, <<http://books.google.co.id/books?id=DayznHNyUtMC>>.

menjadi salah satu penuntut di Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo. Ia juga menyatakan bahwa kejadian seperti itu juga terjadi pada saat Jepang masuk ke kota minyak Balikpapan. Selain kedua wilayah yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan laporan dari pemerintah Belanda, pemerkosaan perempuan Belanda yang dilakukan oleh Jepang juga terjadi di Tarakan, Manado, Bandung, Padang, dan Flores selama masa invasi dan juga awal pendudukan.<sup>84</sup>

Selain pemerkosaan, ada juga laporan mengenai penawanan 20 orang perempuan Eropa (diperkirakan berasal dari Belanda) di Blora, dekat Semarang.<sup>85</sup> Di dalamnya terdapat 15 orang, termasuk ibu beserta anak-anaknya, yang diperkosa beberapa kali dalam sehari dan hal ini berlangsung selama tiga minggu, oleh serdadu Jepang yang lewat di rumah tersebut. Hal ini berakhir pada saat seorang pegawai Jepang yang memiliki reputasi tinggi tidak sengaja berkunjung ke tempat itu.

Jan O'Herne adalah seorang perempuan yang lahir di Bandung tahun 1923.<sup>86</sup> Setelah invasi Jepang di pulau Jawa, ia disekap di suatu kamp bersama perempuan muda lainnya. Lalu pada Februari 1944, ia dikirimkan ke sebuah rumah hiburan militer Jepang di Selarang. Pada pagi berikutnya, mereka difoto, kemudian foto mereka dipajang di sebuah ruangan. Foto tersebut digunakan untuk mempermudah pemilihan perempuan yang ingin digunakan oleh tentara Jepang. Perempuan-perempuan *jugun ianfu* itu diperkosa siang dan malam. Perempuan yang hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya.

Di suatu kamp di Lampersari, terjadi suatu hal yang cukup mengejutkan yaitu pihak tentara Jepang melepaskan perempuan-perempuan yang telah mereka rekrut, karena rasa kasihan.<sup>87</sup> Namun hal yang berbeda ditunjukkan di Gedangen, yaitu para perekrut merasa tidak puas akan apa yang mereka peroleh dari perekrutan yang mereka lakukan, lalu merekrut perempuan-perempuan yang lain

---

<sup>84</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 62.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Comfort Women*, Australian War Memorial, 28 Mei 2008, <<http://www.awm.gov.au/alliesinadversity/prisoners/women.asp>>.

<sup>87</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 58.

dengan paksaan. Sayangnya mereka mendapat hambatan karena penduduk setempat menyerang mereka dengan bambu runcing.

Pada 23 Februari 1944, ada dua anggota militer Jepang dengan enam preman yang datang ke Ambarawa dan mendata seluruh perempuan berusia antara 17—28 tahun.<sup>88</sup> Yang mereka data antara lain adalah nama, umur, tempat asal, status pernikahan, dan ada atau tidaknya anak. Beberapa hari kemudian, perempuan-perempuan yang telah didata dikirimkan ke Semarang. Contoh kartu registrasi berisi data-data pribadi para perempuan yang akan dijadikan *jugun ianfu* dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

登録票様式 (A)		外国人登録票様式証明書	
939			
姓名(英名)	E. B. van der Ploeg. 17. 11.		
現住所	Jawa Tengah, Indonesia		
(1) 国籍 (2) 出生地 (3) 出身地	(1) Belanda (2) dan (3) Jawa		
職業	Typist dan lain-lain		
在留年数	17 tahun ke belakang		
(1) 此間各作年 (2) 家来数(計総年)	(1) - (2) -		
大日本軍に對する強要登録		外国人登録	
登録シテハルコトヲ證明ス		1944年2月23日	

Gambar 3.2. Kartu registrasi yang dikeluarkan oleh tentara Jepang.<sup>89</sup>

Setelah itu, mereka yang telah didata dipaksa untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan kesediaan mereka dan tawaran uang muka sebanyak 50 guilder, yang pada saat itu mereka tolak. Tidak lama kemudian dilakukan pemeriksaan medis terhadap perempuan-perempuan tersebut dan kemudian mereka disalurkan ke empat tempat hiburan, yaitu *Shoko* (Officers' Club) untuk

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Op.cit.* Yoshiaki. Hlm. 152.

para kadet, *Semarang Club*, *Hinomaru*, dan *Futabaso*.<sup>90</sup> Mereka dipaksa bekerja sejak 1 Maret 1944.

Laporan lain berasal dari perempuan berusia 18 tahun yang tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Pada April 1944 ia diminta untuk melapor bersama kakak perempuannya (19 tahun), ke pangkalan polisi setempat.<sup>91</sup> Menurut pengakuan dari perempuan tersebut, di pangkalan polisi itu sudah ada sekitar 100 orang perempuan yang menunggu. Mereka berasal dari suku bangsa Eropa, Cina, dan Jawa. Setelah menolak penawaran uang (dari pihak Jepang), mereka dipindahkan ke Semarang secara paksa. Di Semarang perempuan berusia 18 tahun ini dipaksa untuk melayani seseorang yang mengaku dokter. Dokter itu melukainya dengan memasukkan suatu benda ke dalam vaginanya. Setelah itu, perempuan malang tersebut dibawa ke Flores melewati Surabaya.

Berdasarkan catatan dari Kim Il Myon, tempat hiburan di wilayah Jawa berdiri di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Malang.<sup>92</sup> Kesemuanya dijalankan dengan kepemilikan pribadi. Karena wilayah kelautan Indonesia mudah diserang oleh Sekutu, maka sedikit sekali perempuan Korea yang dapat dibawa ke Indonesia. Maka dari itu permintaan akan orang *Indo* cukup tinggi. Kim menyebutkan bahwa kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para perempuan Belanda di Indonesia pada waktu itu dilakukan secara terpaksa.

---

<sup>90</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 59.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 140.



**Gambar 3.3.** Sekelompok wanita di Kamp Tawanan Makassar, Batavia, 1945.<sup>93</sup>

Dua orang perempuan Jepang yang salah satunya merupakan juru ketik pada suatu lembaga khusus yang memiliki hubungan politik dengan komunitas Indonesia, menceritakan mengenai keadaan di Surabaya.<sup>94</sup> Perempuan tersebut menyebutkan perbedaan antara klub yang diperuntukkan bagi perwira atau petugas Jepang, yang mempekerjakan perempuan Jepang yang profesional, dan rumah tempat hiburan seperti barak yang mempekerjakan beberapa perempuan Korea.

Bayaran untuk tempat yang cukup terpencil berkisar antara 200—350 rupiah per tiket.<sup>95</sup> Namun ada juga yang membayar untuk waktu yang lebih lama. Setiap bulannya mereka dapat mengantongi sampai 60.000 rupiah. Mereka diberikan dua hari bebas apabila dalam masa menstruasi dan satu setengah hari untuk cuti dari pekerjaan. Pada klinik tertentu terdapat suster yang secara khusus mencatat mengenai periode menstruasi para *jugun ianfu*, jadi pihak pengelola tempat hiburan dapat mengetahui perempuan mana saja yang benar-benar dapat dipekerjakan dan yang tidak.

<sup>93</sup> *Op.cit.* Tanaka. Hlm. 70.

<sup>94</sup> *Op.cit.*

<sup>95</sup> *Ibid.* Hlm. 146-147.

Harian *Tempo* mengadakan investigasi secara luas yang menghasilkan data yang beragam dan dipublikasikan pada 25 Juli dan 18 Agustus 1992. Terdapat beragam penggambaran mengenai tempat-tempat hiburan yang dibuat oleh Jepang ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat hiburan itu merupakan tempat yang sangat gelap, kelam, dan suram. Informan di wilayah Rembang mengatakan bahwa *jugun ianfu* di wilayah itu merupakan perempuan-perempuan yang profesional, atau setidaknya beroperasi secara sukarela.<sup>96</sup> Para perempuan itu memiliki pemikiran bahwa nantinya apabila mereka berprofesi sebagai *jugun ianfu*, mereka akan dapat makan makanan enak dan memakai baju-baju yang bagus. Menurut informan tersebut, di sana tidak terjadi pemaksaan. Menurutnya kehidupan dari perempuan-perempuan tersebut lebih aman dibandingkan dengan kehidupan penduduk mayoritas.

Apabila di bandingkan dengan pulau lain, maka pulau Jawa adalah wilayah yang paling merasakan kekerasan dan kekejaman Jepang. Karena, tentara Jepang banyak berkonsentrasi di wilayah Jawa, maka banyak tempat hiburan yang melibatkan *Kempeitai*.

Pihak dari kamp Belanda berusaha untuk mencegah berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Jepang, salah satunya dengan cara menghimbau para orangtua untuk menyembunyikan anak gadis mereka. Walaupun begitu, masih ada saja perempuan yang tertangkap oleh Jepang untuk dijadikan *jugun ianfu*. Para ibu yang kehilangan anak-anak gadisnya mengadakan perlawanan begitu keras, sehingga aparat keamanan dari pihak Indonesia mau tidak mau harus turut campur tangan untuk mengontrol mereka.

Ketje Ruizeveld adalah salah seorang perempuan Belanda yang ditahan di suatu kamp Bandung.<sup>97</sup> Ia menceritakan kisahnya di surat kabar *Volkskrant* mengenai bagaimana ia direkrut. Ia bersyukur karena pada waktu itu anak gadisnya tidak ikut diambil oleh pihak Jepang karena baru berumur 12 tahun. Ia merelakan dirinya agar keluarganya bisa selamat dari kekejaman Jepang.

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Hlm. 142.

<sup>97</sup> *Ibid.* Hlm. 151.

Tempat ia bekerja tidaklah seburuk yang ia pikirkan. Di tempat ini, orang-orang Jepang yang ia temui adalah orang-orang yang sopan. Dan yang terpenting, di tempat ini mereka masih dianggap sebagai manusia. Sebagai contoh, klien di tempat tersebut biasanya mandi sebelum diservis oleh *jugun ianfu*. Walaupun begitu, tetap ada perempuan yang merasa bahwa hal ini merupakan sesuatu yang berat, kemudian bunuh diri.

### 3.2. *Jugun Ianfu* di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat permintaan pengiriman perempuan *jugun ianfu* ke wilayah Kalimantan. Pada saat itu Markas Besar Tentara Selatan membuat rencana untuk mendirikan tempat hiburan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Salah satu permintaan itu ditujukan kepada Markas Besar Tentara Taiwan.

Menurut Asmaniar, anggota dewan dari Komisi D DPRD Kalimantan Barat, terdapat perempuan-perempuan yang dijadikan *jugun ianfu* oleh tentara Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia.<sup>98</sup> Namun mereka malu untuk mengungkapkannya. Mereka menganggap hal ini sebagai suatu aib, begitu juga dengan anggapan dari keluarga mereka.

*Jugun Ianfu* di Sumatra disebut dengan *Jalan Ps*, karena mereka sering terlihat diikuti beberapa unit patroli. Hal tersebut terlihat mencolok di mata penduduk setempat, karena wilayah tersebut termasuk wilayah yang jarang dijamah oleh orang luar.<sup>99</sup>

Salah satu *jugun ianfu* di Bangka menceritakan kisahnya yang direkrut dengan berbagai tekanan di sekitarnya.<sup>100</sup> Pada waktu itu statusnya sudah menjadi janda, walaupun ia baru berusia 20 tahun. Dengan keadaannya pada waktu itu, maka perekrutnya menjanjikan prospek yang baik untuk hidupnya dan perawatan untuk orangtuanya. Ia pun akhirnya mengikuti anjuran itu dan pergi ke suatu

<sup>98</sup> Muhlis Suhaeri, *Adakah Jugun Ianfu di Kalbar*, 6 Februari 2008, <<http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2007/06/adakah-jugun-ianfu-di-kalbar.html>>.

<sup>99</sup> *Op.cit.* Hlm. 140.

<sup>100</sup> *Ibid.* Hlm. 145.

tempat hiburan. Di sana, bersama dengan 20 orang perempuan lainnya, ia menemani dan melayani tentara tersebut.

Dalam Sidang Kejahatan Perang Jepang di Tokyo, Taichiro Kaijimura mengumumkan mengenai tindakan prostitusi Jepang yang melibatkan perempuan Australia.<sup>101</sup> Di kamp Aceh, Brastagi, Padang, dan Palembang, terdapat laporan mengenai tekanan yang dilaporkan oleh para *jugun ianfu*, yang juga melibatkan para perawat dari Australia.<sup>102</sup> Pengalaman dari para perawat asal Australia itu menambah kembali lembaran mengenai kasus yang terjadi di Indonesia.

Di suatu kamp di Palembang, terdapat 32 perawat yang ditahan bersama dengan 500 perempuan Indonesia lainnya. Pada saat itu mereka lolos dari tenggelamnya Kapal *Vyner Brooke*, yang sebelumnya mengevakuasikan perawat-perawat dari Singapura. Di Pulau Bangka, terdapat 21 perawat lain yang dibantai oleh tentara Jepang.<sup>103</sup> Satu-satunya yang selamat dari pembantaian di pulau tersebut adalah Vivian Bullwinkel, yang kemudian juga menjadi salah satu perempuan di kamp Palembang.

Berdasarkan laporan dari para perawat itu, tentara Jepang di sana mengosongkan isi-isi rumah di dekat kamp. Setelah itu mereka melengkapi rumah tersebut dengan tempat tidur-tempat tidur yang akan digunakan untuk klab yang merangkap sebagai tempat prostitusi.

### 3.3. *Jugun Ianfu* di Wilayah Sulawesi

Tempat hiburan di wilayah Sulawesi, pertama kali dicetuskan oleh Jendral Anami, yang pada akhir hayatnya ia memutuskan untuk melakukan *seppuku* setelah Jepang menyerah setelah Perang Dunia II.<sup>104</sup> Pusat utama dari tempat hiburan ini berada di Menado dan wilayah sekitar Makassar. Perempuan-perempuan di sana sebagian besar berasal dari Minahasa.

<sup>101</sup> *Japanese War Crimes*, 11 Juni 2008, <[http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese\\_war\\_crimes](http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_war_crimes)>.

<sup>102</sup> *Op.cit.* Hlm. 149.

<sup>103</sup> E. Norman and Angell D, *Vivian Bullwinkel: Sole Survivor of the 1942 Massacre of Australian Nurses*, Nursing History Rreview, 1999, hlm: 97 – 112.

<sup>104</sup> *Era Pendudukan Jepang dan Bom Atom Jelang Kemerdekaan RI*, 6 Juni 2008, <[http://swaramuslim.com/gallery/sejarah/index.php?page=era\\_jepang](http://swaramuslim.com/gallery/sejarah/index.php?page=era_jepang)>.

Setelah Perang Dunia II, Juni 1946, terdapat laporan dari Parepare. Dalam laporan itu dikatakan bahwa setidaknya terdapat 29 tempat prostitusi. Diantaranya tersebar di wilayah Makassar, Parepare, Bulukumba, Makale, Singkang, Menado, dan tempat lainnya. Total perempuan di wilayah ini kurang lebih 280 orang perempuan, 111 adalah orang Toraja, 67 adalah orang Jawa, 7 orang Makassar, 4 orang Mandarin, dan sisanya berasal dari Bugis, Cina, Karo, dan lain-lain—bahkan lebih beragam suku-suku bangsanya dibandingkan dengan di Burma.<sup>105</sup>

Ada dua orang wartawan *Tempo* yang mencoba mencari petunjuk pada buku-buku dari mantan angkatan laut kepolisian khusus Jepang, yang mirip seperti *Kempeitai*, tapi lebih banyak berurusan dengan politik. Buku-buku tersebut menyebutkan mengenai pendirian tempat hiburan di wilayah Ambon dan Makassar.

Di Sulawesi Utara, terdapat saksi mata yang mengatakan bahwa ada dua buah kompleks di Menado dan Tomohon yang dioperasikan oleh pegawai Jepang yang beristrikan seorang perempuan Jerman. Di wilayah itu terdapat 100 orang perempuan yang direkrut dari kampung-kampung di Minahasa. Kondisi material di sana dapat dikatakan ‘terawat dengan baik’.<sup>106</sup> Pihak operasional tempat hiburan tersebut menyediakan makanan dan pakaian yang cukup, sebagaimana juga dengan kondisi kesehatan para perempuan *jugun ianfu*. Perempuan di sana digaji oleh pengelolanya. Di balik kondisi yang terlihat menyenangkan itu, sering terdengar suara teriakan perempuan. Dua perempuan di sana dikabarkan melarikan diri, namun mereka kembali ditangkap di rumah mereka.

Setelah Sekutu memaksa Jepang untuk mundur dari Sulawesi Utara. Para perempuan *jugun ianfu* itu kemudian membubarkan diri ke pelosok kampung di sana sampai perang berakhir. Perempuan-perempuan Malaysia yang berada di sana takut untuk kembali ke kampung halaman mereka karena malu.

### 3.4. *Jugun Ianfu* di Wilayah Bali

---

<sup>105</sup> *Op.cit.* Hicks. Hlm. 141.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Di Bali, seorang mantan penjaga salah satu tempat hiburan di Hotel Wongaye, Denpasar, menggambarkan keadaan tempat hiburan sebagai sesuatu yang lebih kasar.<sup>107</sup> Di tempat ini hanya terdapat 20 orang perempuan *jugun ianfu*. Tugas dari penjaga di sana adalah mendata tamu-tamu yang datang, lalu menunjukkan foto-foto perempuan yang tersedia di tempat itu. Setelah tamu-tamu itu memilih, mereka membeli tiket seharga 300 rupiah. Dengan peraturan, layanan itu hanya berlaku selama sepuluh menit. Perempuan di sana kemudian memperoleh setengah dari bayaran yang mereka peroleh. Namun perempuan-perempuan tersebut tidak dapat menolak tamu yang datang, karena mereka takut akan dibunuh.

### 3.5. Berakhirnya Sistem *Jugun Ianfu*

Pada tahun 1945, setelah Jepang mengangkat kaki dari Indonesia, mereka melepaskan para *jugun ianfu*. Ada yang dikembalikan ke wilayah asalnya masing-masing, namun sebagiannya masih terserak di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asal mereka. Seperti catatan-catatan yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, masih banyak perempuan mantan *jugun ianfu* yang tersebar diberbagai pulau di pelosok Indonesia. Pramoedya dalam bukunya, *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, menceritakan perempuan-perempuan yang terdapat di Pulau Buru.

Keadaan para perempuan setelah Jepang melepaskan mereka adalah sesuatu yang menyedihkan. Sebagian dari perempuan yang telah diperlakukan tidak manusiawi itu ditinggalkan begitu saja di tempat mereka dilecehkan. Pulau Buru merupakan salah satu wilayah terpencil dan asing bagi para perempuan malang tersebut. Mereka tidak dapat kembali karena tidak tahu jalan pulang, atau banyak juga yang malu untuk kembali karena keadaan mereka yang mereka anggap memalukan. Mereka yang bertahan di sana diambil oleh orang-orang dari suku pedalaman untuk dijadikan istri.<sup>108</sup> Kebanyakan dari mereka merupakan perempuan yang menarik. Apabila dibandingkan dengan perempuan asli Buru,

<sup>107</sup> *Ibid.* Hlm. 145.

<sup>108</sup> *Op.cit.* Toer. Hlm. 43-66.

maka keberadaan mereka sangat jauh berbeda. Perbedaan kulit dan wajah mereka sangat berbeda dengan penduduk asli Buru, maka tidak heran mereka menjadi ‘tawanan’ di sana.

Masalah-masalah yang dirasakan oleh para *jugun ianfu* seperti yang dikemukakan oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura, adalah:

- (1) Kesehatan yang buruk, akibat kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang mereka alami selama menjadi *jugun ianfu*. Karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk memelihara kesehatannya, sebagian besar *jugun ianfu* meninggal karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang tidak memadai.
- (2) Trauma akibat perbudakan seks yang harus mereka jalani pada usia yang masih sangat muda.
- (3) Tertekan secara sosial karena oleh masyarakat dianggap sebagai bekas pelacur dan manusia kotor, mengingat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar tentang sejarah *jugun ianfu*.
- (4) Tertekan secara psikis karena perasaan bersalah telah menjadi *jugun ianfu*.
- (5) Sebagian besar *jugun ianfu* dalam keadaan miskin karena ditolak bekerja di tengah-tengah masyarakat dengan alasan bekas pelacur.<sup>109</sup>

Pada April 1993, sejumlah anggota Federasi Asosiasi Pengacara Jepang datang ke Indonesia menemui Menteri Sosial Inten Suweno. Sebagaimana yang dikatakan Tomiko Okazaki dalam buku *Momoye Mereka Memanggilku*,

“Tanggung jawab sesudah Perang Dunia II terhadap para korban *jugun ianfu* belum dilakukan secara resmi oleh Negara Jepang. Oleh sebab itu saya dari partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Jepang sedang berjuang mensahkan Rancangan Undang-Undang mengenai tanggung jawab Negara Jepang sesudah Perang Dunia II untuk para *jugun ianfu*. Jika Negara Jepang mengabaikan tanggung jawab ini, maka Negara Jepang sulit untuk membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara di Asia dan juga tidak bisa mewujudkan masa depan bersama di kawasan Asia...”<sup>110</sup>

<sup>109</sup> *Op.cit.* Hindra. Hlm. ix.

<sup>110</sup> *Ibid.* Hlm. vii.

Setelah datangnya utusan dari Jepang, maka Inten Suweno menanggapi dan mengatakan bahwa *jugun ianfu* Indonesia harus dicari.<sup>111</sup> Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta kemudian melakukan pendataan terhadap *jugun ianfu* dan mendapatkan cukup banyak mantan *jugun ianfu*. Saat ini tercatat kurang lebih 1.156 *jugun ianfu* yang berhasil tercatat.

Pada bulan Juni 1995, Perdana Menteri Tomiichi Maruyama meminta maaf kepada pihak Indonesia, namun tidak ditujukan khusus kepada para *jugun ianfu*.<sup>112</sup> Hal serupa juga dilakukan oleh Perdana Menteri Hashimoto dan Junichiro Koizumi. Walaupun dalam konteks moral pemerintah Jepang telah menyatakan permintaan maaf, namun tetap saja hal itu bukan dalam pertanggungjawaban hukum bagi para mantan *jugun ianfu*.

Dalam International Forum on War Compensation for The Asia Pacific Region di Tokyo-Jepang, Mardiyem, mantan *jugun ianfu* asal Indonesia, bersaksi pada forum internasional. Pada forum itu secara tegas Mardiyem menuntut tiga hal kepada pemerintah Jepang, yaitu:

- (1) Pemerintah Jepang harus mengaku bersalah dan meminta maaf kepada setiap *jugun ianfu*.
- (2) Pemerintah Jepang memulihkan dengan jalan melakukan rehabilitasi nama baik setiap *jugun ianfu* dan menyebarluaskan masalah *jugun ianfu* kepada generasi muda melalui kurikulum pendidikan sejarah di Jepang.
- (3) Memberikan uang kompensasi sebagai korban perang kepada setiap *jugun ianfu*.<sup>113</sup>

Selama ini pemerintah Indonesia menunjukkan sikap yang kurang mendukung terhadap perjuangan *jugun ianfu*. Pemerintah Indonesia belum pernah membicarakan tuntutan para *jugun ianfu* Indonesia kepada pihak pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia juga tidak memberikan tunjangan kesehatan dan kehidupan yang dibutuhkan *jugun ianfu* Indonesia. Maka dari itu, masyarakat

<sup>111</sup> Budi Setiono, *Luka Dari "Saudara Tua"*, 19 Januari 2008, <<http://indoprogress.blogspot.com/>>.

<sup>112</sup> *Jepang Diminta Maaf kepada Wanita Penghibur PD II*, 11 Mei 2008, <<http://www.antara.co.id/catidx/?ch=art>>.

<sup>113</sup> *Op.cit.* Hindra. Hlm. 14.

Indonesia banyak yang belum mengetahui permasalahan mengenai *jugun ianfu*, serta memiliki kepedulian untuk membantu perjuangan para *jugun ianfu* dalam memperoleh keadilan dan memulihkan hak asasi manusianya.

